# Antrean Panjang, Akses Terbatas

## Membenahi Tata Kelola Distribusi dan Mengatasi Kelangkaan BBM di Kabupaten Merauke, Papua Selatan

Kelangkaan BBM di Merauke bukan sekadar persoalan stok, tetapi mencerminkan tantangan distribusi, ketepatan alokasi, pengawasan, dan akses bagi kelompok masyarakat yang paling bergantung pada energi, terutama nelayan kecil, petani, dan pelaku usaha lokal.




## Ringkasan Eksekutif

Kelangkaan BBM di Kabupaten Merauke telah terjadi secara berulang dan berdampak pada aktivitas masyarakat serta perekonomian lokal. Meskipun Pertamina menyatakan stok di Fuel Terminal Gudang Arang dalam kondisi aman, masyarakat masih menghadapi antrean panjang, keterbatasan akses BBM bersubsidi, serta indikasi penyalahgunaan distribusi. Persoalan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan pasokan dan akses nyata di tingkat pengguna. Penyelesaian masalah perlu dilakukan melalui pembenahan data kebutuhan, penertiban distribusi, penguatan pengawasan, dan penyesuaian kebijakan yang lebih berpihak pada kelompok rentan.

## Lima Temuan Utama

1. **Antrean masih terjadi**
   Masyarakat masih mengalami antrean panjang di SPBU meskipun stok terminal dinyatakan aman.
2. **Kuota tidak sebanding dengan kebutuhan**
   Nelayan dan sektor produktif menerima alokasi yang terbatas dibandingkan kebutuhan aktual.
3. **Penyalahgunaan BBM bersubsidi**
   Masih ditemukan praktik penyelewengan dan penjualan kembali BBM bersubsidi.
4. **Distribusi dan pengawasan belum optimal**
   Jadwal distribusi, kapasitas SPBU, dan pengawasan masih menghadapi tantangan.
5. **Dampak pada ekonomi lokal**
   Kelangkaan BBM memengaruhi nelayan, petani, transportasi, perdagangan, dan pelayanan publik.

## Angka Penting

**15.124 KL**
**Pertalite**
Realisasi penyaluran hingga Agustus 2026

**16.812 KL**
**Biosolar**
Realisasi penyaluran hingga Agustus 2026

**8.235 KL**
**Minyak tanah**
Realisasi penyaluran hingga Agustus 2026

- Pertamina menyatakan stok BBM di Fuel Terminal Gudang Arang aman dan kuota Pertalite diperkirakan mencukupi hingga akhir 2026. Penyaluran Biosolar dan minyak tanah memerlukan pengawasan lebih ketat.

Sumber: Pertamina, dipaparkan dalam RDP DPRK Merauke (10 September 2026).

## Merauke dalam Konteks Wilayah




**269.603 jiwa**
Jumlah penduduk Kabupaten Merauke (2024)

**14.904 ton**
Produksi perikanan tangkap (2024)

**Lumbung beras Papua Selatan**
Produksi beras 207.006,95 ton (2025)

Sumber: BPS Kabupaten Merauke (2025).

## Kronologi Kelangkaan BBM di Merauke (2022–2026)

**Juli 2022**



**Nelayan keluhkan kesulitan BBM**
Kuota dinilai tidak bertambah sejak 2010, sementara jumlah kapal terus meningkat.

**April 2025**



**Pemkab Merauke bahas antrean dan penyalahgunaan**
Koordinasi dengan Pertamina dan aparat penegak hukum.

**April 2026**



**Kebijakan WFH ASN**
Dilakukan untuk mengurangi mobilitas dan konsumsi BBM.

**April 2026**



**Pengungkapan penyalahgunaan BBM**
Polda Papua menemukan penampungan dan penjualan ilegal BBM di Tanah Miring.

**Juli 2026**



**HNSI soroti kuota nelayan minim**
Jumlah kapal 600–800 unit dengan kuota sekitar 225 KL (data HNSI).

**Agustus 2026**



**Antrean masih terjadi**
Polres mengusulkan sistem ganjil-genap untuk mengurangi antrean di SPBU.

**September 2026**




**Pertamina: stok aman tetapi perlu pengawasan**
Usulan pembentukan Satgas Terpadu dan penertiban pelangsir.

Sumber: Suara Merauke (2022), Pemkab Merauke (2025), RRI (2026), Polda Papua (2026), Pertamina (2026).



> “Keberlanjutan ekonomi masyarakat Merauke sangat bergantung pada keterjaminan akses energi yang adil dan terdistribusi dengan baik.

# Dari Terminal ke Masyarakat: Di Mana Masalahnya?

Stok BBM di Fuel Terminal Gudang Arang dinyatakan aman, namun masyarakat masih menghadapi antrean panjang dan kesulitan memperoleh BBM. Analisis menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan, distribusi, pengawasan, dan kebutuhan riil di lapangan.




## Rantai Distribusi BBM di Merauke

Terdapat beberapa titik yang berpotensi menimbulkan hambatan sehingga BBM tidak sampai ke pengguna yang berhak.

| Fuel Terminal Gudang Arang | Pengiriman ke SPBU | SPBU dan Lembaga Penyalur | Masyarakat Pengguna |
|---|---|---|---|
| Penerimaan dan penyimpanan stok BBM. | Distribusi dengan jadwal tertentu. | Penyaluran kepada konsumen sesuai ketentuan. | Nelayan, petani, transportasi, usaha kecil, dan rumah tangga. |
| ⚠ Risiko: Keterlambatan pengiriman. | ⚠ Risiko: Kapasitas SPBU terbatas. | ⚠ Risiko: Antrean panjang dan pembelian tidak wajar. | ⚠ Risiko: Penyalahgunaan dan penjualan kembali. |

## Peta Persebaran SPBU di Merauke

Layanan SPBU masih terpusat di kawasan perkotaan, sementara distrik lain memiliki jarak tempuh yang jauh.




**SPBU khusus Amunkay**

Pemerintah Kabupaten Merauke telah menyiapkan lahan ±2,5 hektare di Amunkay untuk pembangunan SPBU yang ditujukan bagi nelayan dengan kapasitas 16 kiloliter. Pembangunan ini masih menunggu persetujuan BPH Migas.

Sumber: Informasi dari Pemkab Merauke (2025); pemberitaan daerah (2025–2026).

## Kebutuhan BBM Nelayan



> *"Kuota yang ada belum sebanding dengan jumlah kapal dan kebutuhan operasional kami. Beberapa kapal bisa membutuhkan sekitar lima hingga sepuluh ton BBM dalam satu kali melaut."*
>
> Ketua HNSI Papua Selatan (24 Juli 2026)

### Karakteristik Kebutuhan BBM Nelayan



| Kapal kecil | Kapal menengah | Kapal penangkap hiu |
|---|---|---|
| Untuk penangkapan dekat pantai. Kebutuhan BBM lebih rendah. | Untuk penangkapan dengan jangkauan lebih jauh. Kebutuhan BBM lebih tinggi. | Dapat membutuhkan sekitar 10 ton BBM dalam satu kali perjalanan melaut. |

### Persoalan utama

- Kuota belum mengikuti pertambahan jumlah kapal.
- Data kapal tidak mutakhir.
- Proses rekomendasi masih rumit bagi nelayan.
- Keterbatasan fasilitas SPBN.

## Kebutuhan BBM Petani



BBM digunakan untuk alat dan mesin pertanian, serta distribusi hasil panen. Kasus penyalahgunaan BBM di Tanah Miring juga menunjukkan bahwa alokasi untuk sektor pertanian perlu pengawasan yang lebih ketat.

## Dampak terhadap Ekonomi dan Pelayanan Publik

| Perikanan | Pertanian | Perdagangan | Mobilitas masyarakat | Pelayanan publik |
|---|---|---|---|---|
| Aktivitas melaut terganggu, biaya operasional meningkat, dan pendapatan nelayan menurun. | Distribusi sarana produksi dan hasil panen terhambat. | Biaya transportasi meningkat, berpotensi mempengaruhi harga barang di pasar. | Waktu tunggu lebih lama dan antrean mengganggu akses jalan. | Berisiko menghambat layanan kesehatan, transportasi darurat, dan distribusi kebutuhan pokok. |

## Temuan Kasus Penyalahgunaan BBM




**Tanah Miring, 16 April 2026**

Polda Papua mengungkap praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi di Gudang UPJA Center Bina Tani. Ditemukan empat tangki berkapasitas 700 liter, pembelian menggunakan surat rekomendasi yang tidak sah, dan penjualan kembali melalui Pom Mini dengan harga lebih tinggi.

**Rp197,9 juta**
perkiraan kerugian negara (sementara)

**2 orang**
ditetapkan sebagai terlapor

Sumber: Polda Papua (27 April 2026).

## Tantangan Utama di Lapangan

1. Ketidaksesuaian kuota dengan perkembangan kebutuhan nelayan, petani, dan pengguna lain.
2. Distribusi terjadwal yang belum menjamin pemerataan akses di seluruh distrik.
3. Penyalahgunaan BBM bersubsidi yang mengurangi efektivitas program.
4. Sistem administrasi nelayan yang masih berbelit.
5. Koordinasi lintas sektor yang belum optimal dalam pengawasan dan penertiban.



# Dari Antrean ke Akses yang Adil

## Rekomendasi Kebijakan untuk Pembenahan Distribusi BBM di Kabupaten Merauke




## Rekomendasi Kebijakan

1. **Membangun sistem data dan transparansi distribusi BBM**
   Menyediakan data kuota, realisasi penyaluran, stok, dan transaksi per SPBU yang dapat diakses publik secara berkala.
2. **Meninjau ulang kuota berdasarkan kebutuhan riil**
   Melakukan evaluasi kuota dengan memperhitungkan pertumbuhan kendaraan, jumlah kapal nelayan, aktivitas pertanian, dan kebutuhan layanan dasar.
3. **Memperkuat layanan BBM bersubsidi bagi nelayan kecil**
   Memutakhirkan data kapal, mempermudah rekomendasi, dan meningkatkan layanan di SPBN.
4. **Memperketat pengawasan dan penindakan**
   Membentuk Satgas Pengawasan BBM Terpadu untuk mencegah penyalahgunaan, mulai dari penerbitan rekomendasi, pembelian, pengangkutan, hingga penjualan kembali.
5. **Membenahi jadwal distribusi dan kapasitas pelayanan SPBU**
   Mengatur rantai distribusi, jam operasional, dan tata antrean agar mengurangi penumpukan dan meningkatkan kelancaran akses.
6. **Melindungi kelompok prioritas**
   Menjamin akses BBM bagi nelayan, petani, transportasi publik, layanan kesehatan, dan pelayanan darurat melalui mekanisme khusus.
7. **Memperkuat pengawasan publik**
   Menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses dan melibatkan organisasi masyarakat, kampung, dan lembaga adat dalam pemantauan distribusi.

## Peran Para Pihak

- **Pemerintah Kabupaten Merauke**
  Koordinasi, pendataan pengguna, pengaturan operasional di daerah
- **Pertamina Patra Niaga**
  Penyediaan dan penyaluran BBM, pengawasan SPBU, pelaporan realisasi
- **BPH Migas**
  Pengaturan alokasi, mekanisme rekomendasi, dan pengawasan distribusi
- **Dinas Perikanan & Dinas Pertanian**
  Pembaruan data nelayan dan petani, verifikasi kebutuhan
- **Kepolisian & Satpol PP**
  Pengawasan dan penindakan penyalahgunaan BBM
- **DPRK Merauke**
  Pengawasan, evaluasi kebijakan, dan dukungan anggaran
- **Organisasi masyarakat**
  Pemantauan distribusi dan penyampaian pengaduan

## Prinsip Dasar

- Keadilan akses
- Berbasis data
- Koordinasi lintas sektor
- Keberlanjutan ekonomi lokal
- Pengawasan partisipatif

## Roadmap Implementasi

**0–3 bulan**
**Pemetaan dan Konsolidasi Data**
- Audit data kuota, stok, realisasi, dan pengguna
- Pembentukan Satgas Pengawasan BBM Terpadu
- Perbaikan mekanisme rekomendasi nelayan

**3–6 bulan**
**Penguatan Distribusi dan Layanan**
- Evaluasi alokasi kuota berdasarkan data riil
- Penataan jadwal distribusi dan operasional SPBU
- Penguatan layanan SPBN dan titik distribusi prioritas

**6–12 bulan**
**Penertiban dan Optimalisasi**
- Penindakan penyalahgunaan
- Uji coba sistem antrean dan pengaturan kendaraan
- Peningkatan kapasitas SPBU dan infrastruktur pendukung

**12–24 bulan**
**Evaluasi dan Keberlanjutan**
- Evaluasi dampak kebijakan
- Penguatan sistem pemantauan berbasis data
- Penyesuaian kebijakan berdasarkan hasil evaluasi

## Indikator Evaluasi

- Rata-rata waktu tunggu di SPBU
- Frekuensi kekosongan BBM
- Realisasi kuota dibanding alokasi
- Jumlah nelayan penerima BBM bersubsidi
- Jumlah pengguna dengan rekomendasi valid
- Jumlah pelanggaran distribusi yang ditindaklanjuti
- Perubahan biaya operasional nelayan dan petani
- Jumlah keluhan masyarakat yang diselesaikan

## Dampak yang Diharapkan

- Nelayan mendapat akses BBM sesuai kebutuhan
- Produktivitas pertanian meningkat
- Biaya distribusi lebih stabil
- Layanan publik lebih terjamin
- Pengelolaan BBM lebih transparan dan akuntabel

> *Pembenahan distribusi BBM di Merauke bukan hanya tentang mengurangi antrean, tetapi tentang memastikan energi menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat, dari pesisir hingga kampung-kampung di pedalaman.*